

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, terdapat 64,19 juta UMKM di Indonesia pada tahun 2022. Banyaknya pengusaha UMKM berpengaruh dan berkontribusi besar dalam mendorong perekonomian di Indonesia. Saat ini perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,03% (Badan Pusat Statistik, 2022).

Usaha kecil dan menengah yaitu bisnis yang mayoritas ditekuni oleh perorangan maupun badan usaha. Usaha tersebut berfungsi untuk dapat meningkatkan stabilitas nasional, pemerataan ekonomi, meningkatkan penghasilan masyarakat, dan memajukan perekonomian (Mutiar & Yudiantara, 2021). Dukungan diperlukan dari semua pihak untuk membantu mengoptimalkan dan mewujudkan UKM yang maju dan berdiri sendiri dengan akses yang lebih luas terhadap pendanaan dari berbagai lembaga keuangan.

Tidak sedikit pelaku usaha yang mengalami kendala mengikuti perkembangan perekonomian yang cukup pesat di Indonesia, terutama dalam hal pembiayaan atau tambahan modal usaha dalam menjalankan usahanya. Untuk mendapatkan pendanaan atau tambahan modal usaha pelaku usaha harus melibatkan pihak ketiga seperti pihak bank dengan memenuhi persyaratan pengajuan yakni adanya laporan keuangan dari usaha tersebut. Oleh karena itu, pengusaha harus membuat laporan keuangan sesuai dengan aturan. Laporan keuangan digunakan pihak bank sebagai bahan analisis. Penilaian kemampuan UKM untuk melunasi hutang dan mengurangi risiko gagal bayar (Nuryaningsih & Kaukab, 2022).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia menyusun dan menetapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang diterapkan secara efektif 1 Januari 2018, yang sebelumnya menetapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. SAK EMKM bertujuan melengkapi kebutuhan pengusaha dalam hal pelaporan keuangan (IAI, 2018).

SAK EMKM disusun dan ditetapkan karena kurangnya ahli akuntansi dan standar ini lebih tidak rumit daripada SAK ETAP. SAK EMKM dapat menunjang pengusaha pada pembuatan laporan keuangan yang memungkinkan mereka mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan (IAI, 2018). SAK EMKM dinyatakan lebih mudah karena mengatur transaksi umum pada usaha kecil dan menengah. Dasar pengukuran yang digunakan adalah biaya historis, dimana aset dan liabilitas dicatat sebesar biaya perolehan (IAI, 2018). Terdapat standar akuntansi yang lebih sederhana ini diharapkan pengusaha akan lebih siap dalam mempraktikkan SAK EMKM pada pelaporan keuangannya.

SAK EMKM ini lebih sederhana namun faktanya tidak semua pelaku usaha dapat membuat laporan keuangan karena tidak mudah untuk diterapkan. Hal ini disebabkan berbagai keterbatasan yaitu kurangnya pengetahuan pelaku usaha mengenai proses menyusun laporan keuangan. Terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak menerapkan perbedaan antara uang individu dengan uang usaha. Pola pemikiran bahwa bisnis yang dilakukan relatif kecil dan tidak memerlukan implementasi akuntansi pada pencatatannya (Pardita dkk., 2019).

Usaha Kecil dan Menengah menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia, oleh karena itu pengusaha harus segera menerapkan pencatatan akuntansi secara teratur dan benar. Pencatatan dan laporan yang baik dan sesuai dengan standar berguna untuk mengukur aktivitas bisnis, menyampaikan informasi keuangan, dan menganalisis kinerja (Purnomo & Adyaksana, 2021).

Laporan keuangan hanya dapat disusun dengan pemahaman akuntansi yang baik. Kurangnya pemahaman tentang akuntansi juga mengakibatkan kendala dalam pelaporan keuangan sesuai SAK EMKM. Pemahaman menyeluruh mengenai akuntansi yang baik, berarti kualitas laporan keuangan semakin baik sehingga pengusaha siap untuk mempraktikkan standar akuntansi keuangan EMKM dalam pembuatan laporan keuangannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pardita, Julianto, Kurniawan (2019) mengungkapkan bahwa tingkat penerapan sistem pencatatan akuntansi, tingkat pemahaman akuntansi, dan tingkat kesiapan pelaku UMKM memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM. Penelitian

Nuryaningsih & Kaukab (2022) memiliki hasil yang berbeda. Penelitian tersebut membuktikan bahwa tingkat pemahaman akuntansi memberikan pengaruh positif dan signifikan, sedangkan tingkat penerapan sistem pencatatan akuntansi dan tingkat kesiapan pelaku tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM. Penelitian yang telah dilakukan Purnomo & Adyaksana (2021) memberikan bukti bahwa kesiapan UMKM memberikan pengaruh positif dan signifikan, sedangkan penerapan sistem pencatatan akuntansi dan pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, menunjukkan ketidakkonsistenan hasil pada setiap variabel yang diuji dan diteliti. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Pardita dkk., (2019). Pada penelitian ini objek yang dipilih berbeda yakni pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Madiun. Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh Tingkat Penerapan Sistem Pencatatan Akuntansi, Tingkat Pemahaman Akuntansi, dan Tingkat Kesiapan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Penerapan SAK EMKM di Kota Madiun”**. Peneliti tertarik dengan UKM di Kota Madiun karena kota tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat ditunjukkan dengan pembangunan beberapa destinasi wisata yang memberikan dampak positif pada perkembangan UKM di Kota Madiun.

## **1.2. Perumusan Masalah**

1. Apakah tingkat penerapan sistem pencatatan akuntansi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM pada UKM di Kota Madiun?
2. Apakah tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM pada UKM di Kota Madiun?
3. Apakah tingkat kesiapan pelaku usaha berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM pada UKM di Kota Madiun?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk membuktikan pengaruh tingkat penerapan sistem pencatatan akuntansi terhadap penerapan SAK EMKM pada Usaha Kecil dan Menengah di Kota Madiun.
2. Untuk membuktikan pengaruh tingkat pemahaman akuntansi terhadap penerapan SAK EMKM pada Usaha Kecil dan Menengah di Kota Madiun.
3. Untuk membuktikan pengaruh tingkat kesiapan pelaku usaha terhadap penerapan SAK EMKM pada Usaha Kecil dan Menengah di Kota Madiun.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang dapat dijadikan referensi atau informasi tambahan kepada penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian dapat membantu pengusaha kecil dan menengah mempunyai pengetahuan yang lebih baik mengenai pentingnya membuat sistem pencatatan akuntansi, pemahaman akuntansi, serta persiapan pelaku usaha dalam menerapkan SAK EMKM pada pembuatan laporan keuangan yang berkualitas.

## **1.5. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang membahas teori yang mendasari penelitian, penelitian-penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan model penelitian.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Pada bab 3 menjelaskan mengenai desain penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, jenis dan sumber data yang akan digunakan, teknik pengumpulan data, sampel, populasi, serta teknik penyampelannya, dan analisis data.

### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab 4 menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan hasil analisis data.

### **BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Pada bab 5 menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran penelitian.